

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
(Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang)**

Patricia Saptapradipta
patriciadipta@gmail.com

Universitas Brawijaya Malang
Jl. Veteran, Malang

ABSTRACT

The passage of Act 17 of 2003 and Act 1 of 2004 to the beginning of the government to reform the country 's financial management after the new order. From both these laws, the government sparked a renewal of a flexible financial management referred to the Public Service Agency. However, that model still created problems that made a loss for the state. Considering the above problems, the unit needed to implement good governance in order to improve performance and community service. Good corporate could be achieved through the role of internal audit and internal control. Therefore, this study aimed to examine the influence of internal audit and internal control to good governance either partially or simultaneously.

The research analysis unit was Public Service Agency of Brawijaya University with research samples of 109 people. The sampling method used purposive sampling with data collection techniques through questionnaires. This research was explanatory research through hypothesis testing. The results show that internal audit and internal control have positive and significant impact on good governance both partially and simultaneously, which indicate that both internal audit and internal control can enhance the creation of good governance.

Keywords: Internal Audit, Internal Control, Good Governance

1. Latar Belakang

Pemerintah mulai melakukan perubahan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara yang berawal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada masa orde baru yang terus berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Kesempatan untuk melakukan korupsi pada masa tersebut telah menggerogoti keuangan negara dan menyebabkan runtuhnya perekonomian negara. Sejak runtuhnya masa orde baru tersebut, pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Reformasi pengelolaan keuangan negara terwujud dalam Undang-Undang (UU) No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU tersebut yang menjadi dasar reformasi pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan reformasi yang mencakup *budget reform* dan *discretion reform* yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 68 dan pasal 69. *Budget reform* dilakukan pemerintah terhadap sistem penganggaran yang masih tradisional menjadi sistem yang lebih modern. Sistem penganggaran modern ini lebih berorientasi pada kinerja atau *output* yang memperlihatkan seberapa jauh pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak hanya sekedar membiayai input dan prosesnya saja. Sedangkan *discretion reform*, yang dilakukan oleh pemerintah berupa keleluasaan mengenai pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun belanja. Keleluasaan pengurusan keuangan tidak terjadi secara terpusat, namun berubah menjadi horizontal dimana pendapatan dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja. (<http://sukmaadnan.wordpress.com>, 10 November 2013)

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat, dalam pengelolaan keuangannya bersifat fleksibel dan berprinsip efisiensi, ekonomis dan efektif sesuai dengan UU No.17 tahun 2003. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pemerintah membentuk BLU bagi instansi pemerintah sesuai PP Nomor 23 Tahun 2005 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Namun, munculnya BLU tahun 2007 dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61/2007 sampai dengan saat ini masih BLU menimbulkan beberapa masalah.

Penyelewengan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus BLU salah satunya terjadi di Universitas Jendral Soedirman (Unsoed). Rektor Unsoed ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan korupsi terhadap dana BLU. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, total kerugian negara dalam proyek kerja sama senilai Rp 5,8 miliar tersebut sekitar Rp 2,154 miliar. Para tersangka diduga menyelewengkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Antam (Kompas online Kamis, 14 November 2013). Permasalahan lainnya terjadi pada BLU Transjakarta dimana setiap tahunnya telah terjadi pemborosan sekitar Rp30 Milyar seperti yang dijelaskan dari Poskota online, 15 Januari 2010.

Merujuk dari beberapa fenomena mengenai BLU diatas yang masih jauh dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat pastinya sangat menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah khususnya organisasi BLU dituntut masyarakat untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi faktor penting untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu melaksanakan praktik *good governance* yaitu adanya fungsi audit internal. Sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2009:189) bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberadaan audit internal untuk menjalankan fungsi pemeriksaan seperti yang dijelaskan Mardiasmo dapat mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola yang baik.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun pengendalian. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Perancangan pengendalian internal di setiap lingkungan instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Hal diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan *good governance* pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Audit Internal

Audit internal menurut *The Institute of Internal Auditor* (IIA) adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. (*Jr., William F. Messier, Glover, Steven M. and Prawitt, Douglas F., 2005:514*)

Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Menurut *Boynton, Johnson dan Kell* (2006:8) tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Menurut Mulyadi (2002:211) fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Standar Profesi Audit Internal

Independensi Auditor Internal

Auditor internal harus objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun, seperti yang dikemukakan Tugiman (2006:20), sebagai berikut :

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal

dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif pada auditor internal”.

Kemampuan Profesional

Menurut Tugiman (2006:27) kemampuan profesional adalah :

“tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.”

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan menurut Tugiman, (2006:41) meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.

Wardoyo dan Lena (2010:4) menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan.

Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Tugiman (2006:53) menyatakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up*).”

2.2. Pengendalian Internal

Menurut *the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission* (1994:13) pengendalian internal didefinisikan sebagai:

a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations.

Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi No.78 (SAS 78) sesuai dengan rekomendasi COSO terdiri dari lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, pengawasan dan aktivitas pengendalian.

Lingkungan Pengendalian

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan bahwa komponen yang harus diterapkan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian terdiri dari:

1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi;
3. kepemimpinan yang kondusif;

4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penilaian Resiko

Penilaian resiko dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan laporan keuangan. dalam PP No. 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat 2, penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.

Informasi dan Komunikasi

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 pasal 41, pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pengawasan

Menurut Hall (2009:190) menjelaskan definisi pengawasan (*monitoring*) yaitu sebagai proses yang memungkinkan proses desain pengendalian internal serta operasinya berjalan. Dijelaskan dalam PP No.60 tahun 2008 pasal 43 bahwa pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Aktivitas Pengendalian

Mulyadi (2005:189) menjelaskan aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian fisik berhubungan dengan enam kategori menurut Hall (2009:191-194) antara lain:

1. Otorisasi transaksi
2. Pemisahan tugas
3. Supervisi
4. Catatan akuntansi
5. Pengendalian akses
6. Verifikasi independen

2.3. Good Governance

Good governance didefinisikan oleh *World Bank* (dalam Mardiasmo, 2009:18) sebagai:

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000. menjelaskan pengertian kepengemrintahan yang baik, yaitu : kepengemrintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan

prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Menurut Zarkasyi (2008:36) definisi dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan”.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 adalah (a) *transparency*, (b) *independency*, (c) *accountability*, (d) *responsibility*, dan (e) *fairness*.

Transparansi

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Selain itu, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjelaskan bahwa transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Independensi

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan independensi sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Akuntabilitas

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pengertian lainnya diuraikan oleh *Kumaat* (2011:23) akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komperhensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.

Pertanggungjawaban

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa

pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Kewajaran

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan kewajaran (*fairness*) sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.

2. Rerangka Teoritis

Teori Keagenan

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kontrak antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. Jensen dan Meckling (1976:5) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah :

“a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Definisi diatas menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut (Hikmah, Chairina dan Rahmayanti, 2011:5). Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa pihak manajemen harus melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai perwujudan akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (Hikmah, Chairina dan Rahmayanti, 2011:5)

Dalam hubungan keagenan, pihak fakultas yang diberikan wewenang untuk menjalankan operasi secara tidak langsung akan memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan pimpinan universitas. Ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara pihak fakultas dan pimpinan universitas akan menimbulkan asimetri informasi. Hal ini akan memberikan kesempatan dan peluang bagi pihak fakultas menyalahgunakan dana yang diperoleh untuk memberikan keuntungan bagi dirinya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan oleh pimpinan universitas karena adanya perbedaan kepentingan tersebut. Berdasarkan teori ini, maka peran audit internal di lingkungan universitas dan membangun pengendalian internal yang kuat didalamnya sangat dibutuhkan untuk mencegah atau mengurangi pihak fakultas melakukan penyalahgunaan sehingga dapat merugikan universitas secara umum.

Hubungan antara Audit Internal dan Pelaksanaan *Good Governance*

Secara lebih spesifik, organisasi mengandalkan fungsi audit intern untuk membantu memastikan bahwa proses manajemen risiko, lingkup pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan ekspektasi manajemen. Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan

memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal tidak hanya sebatas sebagai “*detector*” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance*.

Hubungan pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan GCG juga dibuktikan dalam penelitian Gumilang (2009), Kusmayadi (2009), dan Wardoyo & Lena (2010). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis mengembangkan hipotesis berikut ini:

H₁ : Audit internal berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*

Hubungan antara Pengendalian Internal dan Pelaksanaan *Good Governance*

Membangun pengendalian internal yang kuat merupakan kewajiban bagi setiap organisasi yang ingin menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*). Seperti halnya audit internal, Mardiasmo juga menguatkan bahwa *good governance* dapat diwujudkan melalui salah satunya pengendalian. Pengendalian (*control*) dijelaskan Mardiasmo sebagai mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai.

Hubungan antara pengendalian internal dan *good governance* telah terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2011) dan Pratolo (2007). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadillah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) seluruh Indonesia, hasilnya membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari penelitian Pratolo bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan kinerja BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pada BUMN di Indonesia, perusahaan perlu meningkatkan pengendalian internnya dalam rangka peningkatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian lainnya juga dibuktikan oleh Halim (2012) yang dilakukan di satuan kerja lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, dimana pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis mengembangkan hipotesis berikut ini:

H₂ : Pengendalian internal berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*

Hubungan antara Audit Internal, Pengendalian Internal dan Pelaksanaan *Good Governance*

Menurut Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG) (2003:2) sebagai landasan teori dari konstruk yang ketiga ini menyatakan bahwa dalam mengembangkan *good corporate governance* perlu penegasan kembali tanggung jawab dewan direksi untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi. Dewan direksi dapat memanfaatkan fungsi audit internal dalam melakukan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal telah memadai.

Peran audit internal yang efektif dapat membantu dan memudahkan dewan direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penciptaan fungsi audit internal dan membangun pengendalian internal memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *good corporate governance*.

Penelitian yang mendukung model konseptual yang hendak dibangun ini dilakukan oleh Dewitasari (2009). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa audit intern dan pengendalian intern secara simultan/bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* pada salah satu BUMN di Jakarta. Halim (2012) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hasil penelitian Halim menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis mengembangkan hipotesis berikut ini:

H₃ : Audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan *good governance*

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*), merupakan riset yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti atas pertanyaan penelitian melalui pengujian hipotesis.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Brawijaya dan satuan kerja pada Universitas Brawijaya sebagai unsur penyelenggara akademik yang berjumlah 12 fakultas dan 2 program yang setara dengan fakultas. Satuan kerja tersebut dianggap sebagai pengguna anggaran dan wajib melakukan aktivitas akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pusat.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai di lingkungan UB yang berjumlah 2.382 orang (Kepegawaian UB, 2013). Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel secara nonprobabilitas (pemilihan nonrandom) dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) SPI UB, pejabat struktural dan tenaga kependidikan di fakultas/program (unsur penyelenggara akademik) UB.
- 2) Tenaga kependidikan di fakultas/program (unsur penyelenggara akademik) UB yang terlibat saat pelaksanaan audit berlangsung.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka diperoleh besarnya sampel dalam penelitian ini berjumlah 142 orang. Hasil kuesioner tersebut yang dijadikan sebagai acuan untuk diolah dengan menggunakan alat bantu *software* statistik SPSS versi 20.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil kuesioner yang telah diisi oleh anggota SPI dan pihak-pihak yang telah ditentukan di setiap fakultas/program di Universitas Brawijaya Malang.

Varibel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini beserta operasionalisasinya (dimensi dan elemen) dapat dilihat secara ringkas pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Elemen	Skala
Audit Internal (X ₁)	Independensi (X _{1.1})	Kebebasan dari pengaruh/tekanan klien	Likert
	Kemampuan Profesional (X _{1.2})	pengetahuan dan kemampuan mengaudit secara teliti dan seksama	
	Ruang Lingkup Audit (X _{1.3})	a. Kepatuhan terhadap peraturan	
		b. Efisiensi dan efektivitas	
		c. Keandalan laporan keuangan	
		d. Pengamanan aset	
	Pelaksanaan Audit (X _{1.4})	a. Persiapan Penugasan	
		b. Audit pendahuluan	
		c. Pelaksanaan pengujian	
		d. Penyelesaian penugasan	
e. Pelaporan dan tindak lanjut			
Pengendalian Internal (X ₂)	Lingkungan Pengendalian (X _{2.1})	a. penegakan integritas dan nilai etika	Likert
		b. kepemimpinan yang kondusif	
	Penilaian Resiko (X _{2.2})	Identifikasi dan analisis resiko	
	Aktivitas Pengendalian (X _{2.3})	a. Pembinaan sumber daya manusia	
		b. Otorisasi atas transaksi	
Informasi dan Komunikasi (X _{2.4})	Penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi		
Pemantauan (X _{2.5})	Supervisi atas pelaksanaan tugas		
Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> (Y)	Transparansi (Y ₁)	a. Ketepatan waktu menyediakan informasi	Likert
		b. Informasi yang disediakan memadai	
		c. Kemudahan mengakses informasi	

	<p>d. Informasi yang disediakan meliputi hal yang berkaitan dengan Fakultas/program</p> <p>e. Menjaga Kerahasiaan sesuai perundang-undangan yang berlaku</p> <p>f. Kebijakan Fakultas/ program didokumentasikan kepada internal maupun eksternal</p>
Kemandirian (Y ₂)	a. Menghindari dominasi dari pihak manapun
	b. Tingkat kemandirian internal
	c. Tingkat kemandirian eksternal
	d. Pengambilan keputusan secara obyektif
	e. Menghindari adanya saling lempar tanggung jawab
Akuntabilitas (Y ₃)	a. Tingkat kejelasan fungsi
	b. Keselarasan antara kemampuan dan tugas masing-masing
	c. Sistem pengendalian internal yang efektif
	d. Sistem penghargaan/sanksi terhadap kinerja
Pertanggungjawaban (Y ₄)	a. Etika menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab
	b. prinsip kehati-hatian menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab
	c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan
	d. Kepatuhan terhadap anggaran dasar
	e. Kepatuhan terhadap kebijakan Fakultas/program
	f. Melaksanakan tanggung jawab sosial

		a. Kesempatan pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan masukan/pendapat	
	Kewajaran (Y5)	b. Tingkat kesetaraan hak	
		c. Tingkat pemenuhan hak secara adil	
		d. Adanya kompensasi positif	
		e. Adanya kompensasi negatif	

Variabel Independen

Pada penelitian ini, terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen, antara lain audit internal (X_1) dan pengendalian internal (X_2).

Dimensi dari audit internal dapat dipecah menjadi empat, dimana keempat dimensi ini diambil dari penelitian Wardoyo dan Lena (2010). Dimensi-dimensi tersebut antara lain:

1. Independensi ($X_{1,1}$)
2. Kemampuan profesional ($X_{1,2}$)
3. Ruang lingkup audit ($X_{1,3}$)
4. Pelaksanaan audit ($X_{1,4}$)

Sedangkan dimensi dari pengendalian internal dapat dipecah menjadi lima, dimana kelima dimensi ini diambil dari penelitian Fadilah (2011). Dimensi-dimensi tersebut antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian ($X_{2,1}$)
2. Penilaian Resiko ($X_{2,2}$)
3. Aktivitas Pengendalian ($X_{2,3}$)
4. Informasi dan Komunikasi ($X_{2,4}$)
5. Pemantauan ($X_{2,5}$)

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *good governance* (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *good governance* (Y). Variabel ini dapat dipecah menjadi lima dimensi, dimana kelima dimensi ini diadopsi dari penelitian Wardoyo & Lena (2010) dan Fadilah (2011), antara lain:

1. Akuntabilitas (Y_1)
2. Transparansi (Y_2)
3. Pertanggungjawaban (Y_3)
4. Kewajaran (Y_4)
5. Kemandirian (Y_5)

Elemen-elemen *good governance* ini merupakan hasil dari pengoperasionalan penelitian yang dilakukan Gumilang (2009). Dimensi dan elemen-elemennya dapat dilihat ditabel 3.1

Metode Analisis Data

Uji Instrumen Pengukuran

Instrumen yang telah dibuat sebelumnya, harus mampu mengukur senyatanya (*actually*) dan seakuratnya (*accurately*) apa yang harus dikur dari konsep. Pengujian yang digunakan antara lain:

1. Uji Validitas

Teknik uji validitas ini dilakukan dengan kriteria r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Untuk lebih mudahnya dalam menentukan kevalidan item, maka dapat dilihat pada nilai signifikansi. Jika signifikansi $< 0,05$ maka item valid, tetapi jika signifikansi $> 0,05$ maka item tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala Likert 1-5) adalah *cronbach's alpha* (Priyatno, 2012:120). Menurut Sekaran (1992:284) semakin mendekati 1 nilai *cronbach's alpha*, semakin tinggi reliabilitas konsistensi internalnya..

Uji Asumsi Klasik

Konsep uji asumsi klasik menurut Prayitno (2012:93) dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana ada hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari masalah multikolinieritas. Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF yang lebih besar dari nilai 10 (Hair *et al.* 1992).

2. Uji Heteroskedastisitas.

Heterokadastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan pengujian *Glejser* untuk meregresikan nilai absolut residual dengan variabel audit internal (X_1) dan pengendalian internal (X_2). Pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi > 0.05 maka data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila diperoleh nilai signifikansi < 0.05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel. Kriterianya adalah:

- a. Jika $DW > dL$ atau $DW > 4-dL$ berarti terdapat autokorelasi
- b. Jika DW terletak antara dU dan $4-dU$ berarti tidak ada autokorelasi
- c. Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara $4-dU$ dan $4-dL$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

4. Uji Normalitas

Menurut Gudono (147:2012), terdapat lima asumsi klasik yang harus terpenuhi untuk pengujian regresi berganda selain tiga asumsi yang telah dijelaskan diatas antara lain uji normalitas dan uji linieritas.. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi yang normal (Halim:2012). Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*

terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0.05.

5. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang linier antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). Dalam penelitian ini digunakan dua cara untuk menguji. Pertama, secara visual dengan grafik *scatter plot*. Model dikatakan linier apabila plot antara nilai residual terstandarisasi tidak membentuk pola tertentu (acak). Kedua, menggunakan cara *Test for Linierity* yaitu dengan membandingkan F-SDM dengan nilai $F_{(0,05)}$. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai $F\text{-SDM} < F_{(0,05)}$.

Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Penerapan prinsip-prinsip *good governance*

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi

X_1 = Audit internal

X_2 = Pengendalian internal

ε = *Error* (tingkat kesalahan)

Nilai signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 atau 5%. Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan (Priyatno, 2012:86). Artinya, pada penelitian ini peluang terjadinya kesalahan sebesar 5% dengan kata lain kita percaya bahwa 95% hasilnya adalah benar.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Instrumen Pengukuran

Uji Validitas

Berikut hasil uji validitas terhadap variabel audit internal yang digambarkan dalam tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Internal (X_1)

Variabel	Indikator	r hitung	$r_{(0,05)}$	Sig.	Keterangan
X_1	$X_{1,1}$	0.640	0.188	0,000	Valid
	$X_{1,2}$	0.765	0.188	0,000	Valid
	$X_{1,3}$	0.758	0.188	0,000	Valid
	$X_{1,4}$	0.783	0.188	0,000	Valid
	$X_{1,5}$	0.679	0.188	0,000	Valid
	$X_{1,6}$	0.691	0.188	0,000	Valid
	$X_{1,7}$	0.743	0.188	0,000	Valid

Sumber : Data Primer (diolah)

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel audit internal (X_1) memiliki $\text{Sig.} < 0,05$ dan nilai r hitung > dari nilai $r_{(0.05)}$ sebesar 0.188. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator X_1 bersifat valid sehingga layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal (X_2)

Variabel	Indikator	r hitung	$r_{(0.05)}$	Sig.	Keterangan
X ₂	X _{2,1}	0,728	0.188	0,000	Valid
	X _{2,2}	0,819	0.188	0,000	Valid
	X _{2,3}	0,684	0.188	0,000	Valid
	X _{2,4}	0,703	0.188	0,000	Valid
	X _{2,5}	0,604	0.188	0,000	Valid
	X _{2,6}	0,713	0.188	0,000	Valid
	X _{2,7}	0,741	0.188	0,000	Valid

Sumber : Data Primer (diolah)

Selanjutnya, pengujian validitas terhadap pengendalian internal (X_2). Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai $\text{Sig.} < 0.05$. Analisis lain juga diperlihatkan pada hasil yang diperoleh dari r hitung > $r_{(0.05)}$ sebesar 0.188. dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pengendalian internal ini dapat dikatakan valid.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Good Governance (Y)

Variabel	Indikator	r hitung	$r_{(0.05)}$	Sig.	Keterangan
Y	Y ₁	0.600	0.188	0.000	Valid
	Y ₂	0.617	0.188	0.000	Valid
	Y ₃	0.588	0.188	0.000	Valid
	Y ₄	0.558	0.188	0.000	Valid
	Y ₅	0.561	0.188	0.000	Valid
	Y ₆	0.556	0.188	0.000	Valid
	Y ₇	0.642	0.188	0.000	Valid
	Y ₈	0.763	0.188	0.000	Valid
	Y ₉	0.745	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₀	0.770	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₁	0.620	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₂	0.659	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₃	0.509	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₄	0.671	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₅	0.721	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₆	0.661	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₇	0.685	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₈	0.711	0.188	0.000	Valid
	Y ₁₉	0.708	0.188	0.000	Valid
	Y ₂₀	0.708	0.188	0.000	Valid

	Y ₂₁	0.616	0.188	0.000	Valid
	Y ₂₂	0.484	0.188	0.000	Valid
	Y ₂₃	0.561	0.188	0.000	Valid
	Y ₂₄	0.678	0.188	0.000	Valid
	Y ₂₅	0.622	0.188	0.000	Valid
	Y ₂₆	0.617	0.188	0.000	Valid

Sumber : Data Primer (diolah)

Pengujian validitas yang terakhir yaitu terhadap *good governance* (Y). Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Sig.< dari 0.05. Analisis lain juga diperlihatkan pada hasil yang diperoleh dari r hitung > r_(0.05) sebesar 0.188. dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen *good governance* ini dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.4
Hasil Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X ₁	0.777	Reliabel
X ₂	0.777	Reliabel
Y	0.754	Reliabel

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk audit internal (X₁), pengendalian internal (X₂), dan *good governance* (Y) diatas 0.7 artinya instrumen untuk semua variabel dapat diterima dan dikatakan reliabel sehingga dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Multikolinieritas

Tabel 4.5
Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas

Variabel independen	VIF	Keterangan
X ₁	1.351	Non Multikolinieritas
X ₂	1.351	Non Multikolinieritas

Sumber : Data Primer (diolah)

Dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa variabel X₁ dan X₂ memiliki nilai VIF kurang dari 10. Artinya, antar variabel independen X₁ dan X₂ tidak terjadi permasalahan multikolinieritas.

Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel Independen	Sig.	Keterangan
X ₁	0.980	Homokedastisitas
X ₂	0.957	Homokedastisitas

Sumber : Data Primer (diolah)

Dari tabel 4.6 diatas memperlihatkan bahwa nilai Sig. dari masing-masing variabel X₁ dan X₂ lebih besar dari 0.05 atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

masalah heteroskedastisitas pada data dalam penelitian ini. Artinya, varian (penyimpangan) variabel dalam model bersifat homogen.

Uji Asumsi Autokorelasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Asumsi Autokorelasi (Durbin Watson)

<i>Durbin Watson</i>	Kriteria	Keterangan
1.838	$dU (1.715) < DW (1.838) < 4-dU (2.285)$	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data Primer (diolah)

Nilai DW dari output diperoleh sebesar 1.838. Untuk nilai dL dan dU yang didapat dari tabel DW untuk nilai signifikansi 0.05 dengan $n=109$ dan k (jumlah variabel independen) = 2 diperoleh dL sebesar 1.634 sedangkan dU sebesar 1.715. Sehingga, nilai $4-dL = 2.366$ dan nilai $4-dU = 2.285$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW (1.838) berada antara dU dan $4-dU$ kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terjadi autokorelasi.

Uji Asumsi Normalitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Asumsi Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

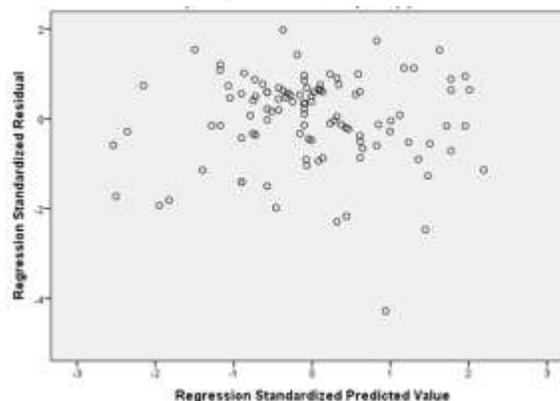
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	Keterangan
0.724	Normal

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas memperlihatkan bahwa nilai sig. > 0.05 . Nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.724 menyimpulkan bahwa residual model regresi yang terbentuk menyebar normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Asumsi Linieritas

Gambar 4.1
Grafik Scatter Plot



Sumber : Data Primer (diolah)

Dari grafik *scatter plot* diatas, bisa dilihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak. Apabila ditarik kesimpulan, maka data tersebut dianggap linier dan data dapat dianalisis menggunakan persamaan regresi linier.

Tabel 4.9
Hasil Uji Asumsi Linieritas

Variabel	F-SDM	Keterangan
X ₁	1.912	Linier
X ₂	0.816	Linier

Sumber : Data Primer (diolah)

Selanjutnya, uji linieritas antara X₁ dengan Y diperoleh dari tabel ANOVA statistik uji F-SDM sebesar 1.912 < F_{0.05(2,106)} sebesar 3.082, maka asumsi linieritas dapat diterima. Sehingga hubungan antara X₁ dengan Y bersifat linier. Sedangkan uji linieritas antara X₂ dengan Y diperoleh statistik uji F-SDM sebesar 0.816 < F_{0.05(2,106)} sebesar 3.082, maka asumsi linieritas dapat diterima. Sehingga hubungan antara X₂ dengan Y bersifat linier.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis-hipotesis yang telah disusun sebelumnya, akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil analisis regresi diperoleh data seperti pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficient	T-test		F-test		R	R Square
		t	Sig.	F.	Sig.		
(Constant)	0.947	3.276	0.001	56.998	0.000	0.720	0.518
X ₁	0.203	2.830	0.006				
X ₂	0.533	7.413	0.000				

Sumber : Data Primer (diolah)

Model Regresi yang Terbentuk

Model regresi linier berganda yang terbentuk untuk data penelitian ini adalah:

$$Y = 0.947 + 0.203 X_1 + 0.533 X_2$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 0.947 berarti bahwa apabila nilai X₁ dan X₂ tidak terjadi peningkatan maupun penurunan dengan kata lain bernilai 0, maka Y bernilai positif sebesar 0.947.
- 2) Nilai koefisien regresi yang didapat bernilai positif. Artinya, kedua variabel independen tersebut memiliki hubungan positif (berbanding lurus) dengan variabel dependen.

Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini sebesar 0.720. Nilai ini mendekati 1, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara audit internal (X₁) dan pengendalian internal (X₂) dengan *Good Governance* bersifat erat.

Di sisi lain, koefisien determinasi (R²) yang diperoleh adalah 0.518 atau 51.8%. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 51.8% keragaman *Good Governance* (Y) dapat dijelaskan oleh variabel audit internal (X₁) dan pengendalian internal (X₂), sedangkan 48.2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini dan *error*.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dimaksudkan agar diketahui pengaruh variabel audit internal (X_1) dan pengendalian internal (X_2) secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel *Good Governance* (Y).

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diuraikan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel independen (audit internal dan pengendalian internal) terhadap pelaksanaan *Good Governance* sebagai berikut dengan kriteria pengambilan keputusan adalah H_0 ditolak jika $\text{Sig.} < 0.05$ dan nilai statistik uji $t > t_{0.025(106)}$.

a. Variabel audit internal (X_1) terhadap *Good Governance* (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai statistik uji t untuk variabel audit internal (X_1) sebesar 2.830 yang memiliki $\text{Sig.}=0.006$ di mana nilai Sig. ini kurang dari 0.05 dan nilai $t > t_{0.025(106)}$ sebesar 1.983, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 atau menerima H_1 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Good Governance*.

b. Variabel Pengendalian Internal (X_2) terhadap *Good Governance* (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 memperlihatkan bahwa variabel pengendalian internal (X_2) memiliki statistik uji $t=7.413$ dengan $\text{Sig.}=0.000 (<0.05)$, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 atau menerima H_2 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Good Governance*.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Kriteria pengujian simultan ini adalah H_0 ditolak jika $\text{Sig.} < 0.05$ dan nilai $F \geq F_{0.05(2,106)}$. Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh nilai $F=56.998$ yang memiliki Sig. sebesar 0.000. Nilai signifikan < 0.05 dan nilai F lebih besar dari $F_{0.05(2,106)}$ sebesar 3.082 sehingga diputuskan untuk menolak H_0 atau menerima H_3 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hubungan antara Audit Internal dan *Good Governance*

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan dari audit internal terhadap *good governance* di lingkungan Universitas Brawijaya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan adanya audit internal di lingkungan Universitas Brawijaya maka akan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wardoyo dan Lena (2010), Gumilang (2009), serta Kusmayadi (2009). Hal ini disebabkan karena audit internal di PT Dirgantara Indonesia mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan kode etik dan standar profesi audit internal sehingga terjadinya kesalahan dan kecurangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Audit internal mampu menilai dan mengevaluasi operasi perusahaan sehingga membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang handal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, diantaranya: informasi keuangan yang handal, informasi mengenai manajemen resiko, informasi mengenai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta informasi mengenai ketaatan terhadap peraturan.

Hubungan antara Pengendalian Internal dan *Good Governance*

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, membuktikan pula bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengendalian internal yang dibangun maka semakin meningkat pula pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Universitas Brawijaya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2011), Pratolo (2007) dan Halim (2012). Hasil tiga penelitian tersebut menekankan bahwa pengendalian internal dapat berpengaruh terhadap *good governance* bisa disebabkan karena beberapa komponen pengendalian internal, antara lain: lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian resiko yang relevan, informasi dan komunikasi yang memadai, efektivitas pengawasan, serta aktivitas pengendalian yang handal dapat dilaksanakan dengan baik disetiap organisasi di atas sehingga mampu memperkecil segala resiko yang mungkin terjadi serta mendorong peningkatan pelaksanaan *good governance* di dalamnya.

Hubungan antara Audit Internal, Pengendalian Internal dan *Good Governance*

Setelah membuktikan secara parsial hubungan yang terjadi antara audit internal dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan *good governance*, penelitian ini juga membuktikan bahwa secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Hal ini menerangkan bahwa peran audit internal yang efektif dan membangun pengendalian internal yang kuat dapat mendorong meningkatnya pelaksanaan *good governance* pada lingkungan Universitas Brawijaya.

Penelitian secara simultan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewitasari (2009). Dalam penelitian Dewitasari menunjukkan bahwa audit intern dan pengendalian intern secara simultan/bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* pada salah satu BUMN di Jakarta. Halim (2012) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hasil penelitian Halim menunjukkan bahwa variabel audit internal dan pengendalian internal tersebut berpengaruh secara simultan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dari hasil dua penelitian tersebut bisa disebabkan karena pengendalian internal yang diciptakan sudah baik sehingga efektivitas pelaksanaan audit internal juga semakin baik. Semakin baiknya audit internal dan pengendalian internal maka pelaksanaan *good governance* juga semakin meningkat. Didukung pula dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa dalam mencapai *good governance* terdapat aspek pemeriksaan dan pengendalian yang sangat mendukung penelitian ini.

5. Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan *good governance*. Selanjutnya, secara parsial audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan *good governance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin efektif pelaksanaan audit internal dan semakin kuat

pengendalian internal yang dibangun maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan *good governance*.

Dengan demikian, penelitian ini secara keseluruhan menjelaskan perlunya fungsi audit internal dan pengendalian internal yang kuat secara beriringan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip *good governance*. Kedua aspek tersebut penting dalam meningkatkan pelaksanaan *good governance*, dimana *good governance* merupakan tuntutan dari masyarakat dan juga cerminan kinerja suatu organisasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan pada penelitian ini antara lain:

1. Terdapat beberapa kuisisioner yang tidak dapat tersebar diakibatkan karena sulitnya birokrasi di salah satu fakultas yang menjadi sampel penelitian ini. Selain disebabkan sulitnya birokrasi yang harus ditaati, alasan lain yang menyebabkan kuisisioner tidak dapat tersebar karena alasan tingginya jam kerja para pejabat untuk beberapa fakultas.
2. Dari hasil R^2 yang diperoleh, nilai sisa sebesar 48.2% merupakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *good governance* yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum yaitu Universitas Brawijaya Malang.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya agar mempersiapkan waktu terlebih dahulu untuk mempelajari birokrasi secara umum di fakultas Universitas Brawijaya dan perlunya kerja sama antara peneliti dan pihak fakultas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain guna dapat menjelaskan variabel *good governance* sehingga diperoleh variabel baru yang dapat mempengaruhi *good governance*.
3. Penelitian selanjutnya dapat meneliti seluruh perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum yang ada di Malang ataupun Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adnan, Sudar Sukma. Anggaran Berbasis Kinerja. <http://sukmaadnan.wordpress.com>. Diakses pada Minggu, 10 November 2013. 20.45
- Anonim. Standar Profesi Audit Internal. <http://digilib.unpas.ac.id/>. Diakses pada 26 Maret 2014
- Boynton, William C., Johnson Raymond N, Kell. Walter G. *Modern Auditing*. Edisi 7. Penerjemah Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi, Erlangga. Jilid I. Jakarta. 2006
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*. 1994. *Internal Control – Integrated Framework*. Two-Volume Edition

- Dewitasari, Reza. Pengaruh Audit Intern dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Salah Satu BUMN di Indonesia. Skripsi. 2009. UIN Syarif Hidayatullah
- Fadillah, Sri. 2011. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan *Good Governance*. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh
- Faoziyanti, Fepi. (2013). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja BUMN dengan Pendekatan *Balance Scorecard*. Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013. Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Finesso, Gregorius Magnus*. Rektor Unsoed Terancam Hukuman 20 Tahun. <http://regional.kompas.com>. Diakses pada Kamis, 14 November 2013. 15.35
- Gudono. "Analisis Data Multivariat." Edisi 2. BPFE UGM, 2012.
- Gumilang, Gita. 2009. Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Halim, Affandi Rahman. Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada satuan kerja lingkup wilayah kerja KPPN Malang. Skripsi. 2012. Universitas Brawijaya
- Hall, James A. 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat, Terjemahan Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary, Salemba Empat, Jakarta.
- Hikmah, Noor; Chairina dan Rahmayanti, D. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh
- <http://poskota.co.id>. Rp30Miliar, Pemborosan TransJakarta Tiap Tahunnya. Diakses pada Kamis, 14 November 2013. 16.00
- Institute of Internal Auditors*. www.theiia.org. Diakses pada 9 Januari 2014. 11.50
- Jensen, Michael C. and Meckling William H. 1998. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Harvard University
- Jr., William F. Messier, Glover, Steven M. and Prawitt, Douglas F. *Auditing and Assurance Services*. Buku kedua. Edisi 4. Penerjemah Nuri Hinduan. Jakarta: Salemba Empat. 2005
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia
- KPMG. 2003. *Internal Audit's Role in Modern Corporate Governance*. KPMG International
- Kresiadanti, Anastasia Rasia Rahma. Pengaruh *Internal Control* dan *Internal Auditor* Terhadap Akuntabilitas di Universitas Brawijaya. Skripsi. 2013. Universitas Brawijaya
- Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga
- Kusmayadi, Dedi. Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Bank. Jurnal Keuangan dan

- Perbankan. Volume 16 No. 1 Januari 2012, pp.147-156. Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku kesatu. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Pratolo, Suryo. 2007. *Good Corporate Governance* Dan Kinerja BUMN Di Indonesia: Aspek Audit Manajemen Dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hasanudin Makasa
- Priyatno, Duwi. "Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS." Andii Yogyakarta, 2012
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.47. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.70. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI tahun 2004, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas RI) Nomor 16 tahun 2009. Sekretariat Kabinet RI
- Sam'ani. Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2004 – 2007. Tesis. 2008. Universitas Diponegoro Semarang
- Sekaran, Uma. *Research Methods for Business*. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. Singapore. 1992
- Tugiman, Hiro. Standar Profesional Audit Internal. Edisi Kelima. Kanisius. Yogyakarta. 2006
- Wardoyo, Trimanto S., dan Lena. 2010. Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada PT Dirgantara Indonesia. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1 September-Desember.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Cetakan kesatu. Bandung: Alfabeta